

**Kurikulum
SEKOLAH DASAR 1975**

Garis-Garis Besar Program Pengajaran

ARSIP TUNGGAL
DISK LEP 1 &
I-L-P I KEMBALIKAN

**BUKU I
Ketentuan-ketentuan Pokok**

16.651/2017

**DOKUMENTASI
PUSAT KURIKULUM**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**PN BALAI PUSTAKA
Jakarta 1976**

**Kurikulum
SEKOLAH DASAR 1975**

Garis-Garis Besar Program Pengajaran

**BUKU I
Ketentuan-ketentuan Pokok**

DOKUMENTASI
PUSAT KURIKULUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

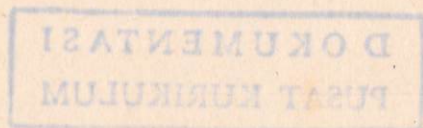


PN BALAI PUSTAKA
Jakarta 1976

Penerbit & Percetakan
PN BALAI PUSTAKA

BP No. 2606

Hak Pengarang dilindungi Undang-undang



Izin No. 027/Iz/Sekj/Depk/E/76

Sejak tahun 1968 masyarakat dan dunia pendidikan Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan penelitian pendidikan secara nasional, kegiatan-kegiatan Proyek Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM), usaha-usaha pencetakan buku-buku pelajaran, kegiatan-kegiatan pembaharuan pendidikan melalui Proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan berbagai usaha lainnya telah mempengaruhi arah pembinaan pendidikan secara nasional. Di samping perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari usaha-usaha pembaharuan pendidikan, masyarakatpun selalu berubah dalam tuntutan-tuntutannya terhadap dunia pendidikan. Arah dan tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan pada tahun 1973, mencerminkan betapa masyarakat dan negara Indonesia telah secara jelas menggariskan harapannya kepada dunia pendidikan.

Dunia dan masyarakat yang telah mengalami perubahan sejak tahun 1968 belum diperhitungkan pada saat kita menyusun kurikulum 1968. Oleh karena itu, Pemerintah, c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Mei 1974, menyadari betapa kita harus meninjau dan memperbaharui kurikulum yang sudah berjalan selama 6 tahun itu agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan baru masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kebijaksanaan tersebut telah melahirkan serangkaian kegiatan untuk meneliti dan mengembangkan kurikulum baru yang lebih sesuai dengan tuntutan baru. Hasil kegiatan-kegiatan tersebut, yang secara bersama telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah saya terima dan setujui untuk dibakukan sebagai Kurikulum SD tahun 1975.

Sesuai dengan Keputusan kami tanggal 17 Januari 1975 No. 008c/U/1975 kurikulum tersebut secara bertahap akan mulai berlaku pada tahun ajaran 1976.

Kiranya perlu disadari oleh semua Kepala Sekolah dan guru bahwa maksud utama disusunnya kurikulum ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Suatu hasil pendidikan dapat dianggap tinggi mutunya apabila kemampuan, pengetahuan dan sikap yang dimiliki para lulusan berguna bagi perkembangan selanjutnya, baik di lembaga pendidikan yang lebih tinggi (bagi yang melanjutkan pelajaran) maupun di masyarakat kerja (bagi mereka yang terjun ke masyarakat kerja), sedangkan mutu itu sendiri baru mungkin kita capai apabila proses belajar yang kita selenggarakan di kelas benar-benar efektif dan fungsional bagi pencapaian kemampuan, pengetahuan dan sikap yang dimaksud.

Di dalam kurikulum ini kemampuan (kecerdasan dan ketrampilan), pengetahuan dan sikap dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum ini mengenal berbagai tingkatan tujuan pendidikan : tujuan institusional (tujuan yang secara umum harus dicapai oleh keseluruhan program sekolah tersebut), tujuan kurikuler (tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada program sesuatu bidang pelajaran), dan tujuan instruksional (tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada suatu program pengajaran sesuatu bidang pelajaran). Makin kecil suatu pelajaran makin khusus suatu rumusan tujuan.

Setiap guru dan petugas-petugas pendidikan lainnya hendaknya benar-benar mendalami setiap tujuan yang telah ditetapkan agar dapat memahami jenis kegiatan belajar yang perlu direncanakan bagi tercapainya tujuan tersebut. Agar maksud penyusunan rencana kegiatan belajar yang fungsional dan efektif tercapai kurikulum ini mengharuskan setiap guru untuk menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional):

Kurikulum 1975 yang telah kami bakukan tersebut, meliputi bagian-bagian berikut :

- (1) Tujuan-tujuan Institusional dan Struktur Program Kurikulum yang terdapat dalam batang tubuh Keputusan Menteri.

(2) **Garis-garis Besar Program Pengajaran yang meliputi :**

- 2.1. tujuan-tujuan kurikuler setiap bidang pelajaran (bidang studi).
 - 2.2. tujuan-tujuan instruksional umum yang secara bertahap harus dicapai oleh setiap bidang pelajaran.
 - 2.3. pokok-pokok bahasan untuk setiap bidang pelajaran yang secara berencana dari tahun ke tahun harus diajarkan.
- (3) Penjelasan umum pelaksanaan, yang berisi beberapa pengertian dan petunjuk bagaimana menggunakan kurikulum tersebut; dan
 - (4) Pedoman-pedoman khusus tentang pelaksanaan sistem kurikulum ini untuk setiap bidang pelajaran serta pedoman tentang sistem penilaian, program bimbingan dan penyuluhan dan administrasi dan supervisi pendidikan.

Keempat bagian tersebut secara integral harus dipelajari oleh setiap guru, Kepala Sekolah dan petugas-petugas teknis pendidikan lainnya, karena dengan mempelajari kesemuanya itu kita akan dapat memahami dan melaksanakan kurikulum ini.

Beberapa hal khusus yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar kurikulum yang telah kami bakukan ini adalah :

- (1) Kurikulum ini menganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan. Ini berarti bahwa setiap guru harus mengetahui secara jelas tujuan yang harus dicapai oleh para murid di dalam menyusun rencana kegiatan belajar-mengajar dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut.
- (2) Kurikulum ini menganut pendekatan integratif dalam arti setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranannya yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih akhir.
- (3) Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum ini tidak hanya dibebankan kepada bidang pelajaran Pendidikan Moral Pancasila di dalam pencapaiannya melainkan juga kepada bidang pelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah, Geografi, Ekonomi) dan Pendidikan Agama.

- (4) Kurikulum ini menekankan kepada efisiensi dan efektivitas-penggunaan dana, daya, dan waktu-waktu yang tersedia pada jam-jam sekolah hendaknya dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan belajar untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak mungkin dilakukan di luar situasi sekolah (guru-murid, serta fasilitas dan media pendidikan).

Sebagai penutup dari pengantar ini kami mengharapkan agar setiap petugas pendidikan di lingkungan SD (guru dan bukan guru) selalu berusaha meningkatkan pemahaman dan ketrampilan bagi terlaksananya sistem pendidikan nasional secara lebih efisien dan efektif. Hanya dengan usaha yang terus-menerus dari setiap pelaksana pendidikan untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pendidikan nasional, tanggung jawab dan beban yang dipikul kepada kita di dalam menyiapkan generasi penerus dan pengisi kemerdekaan dapat kita laksanakan dengan baik.

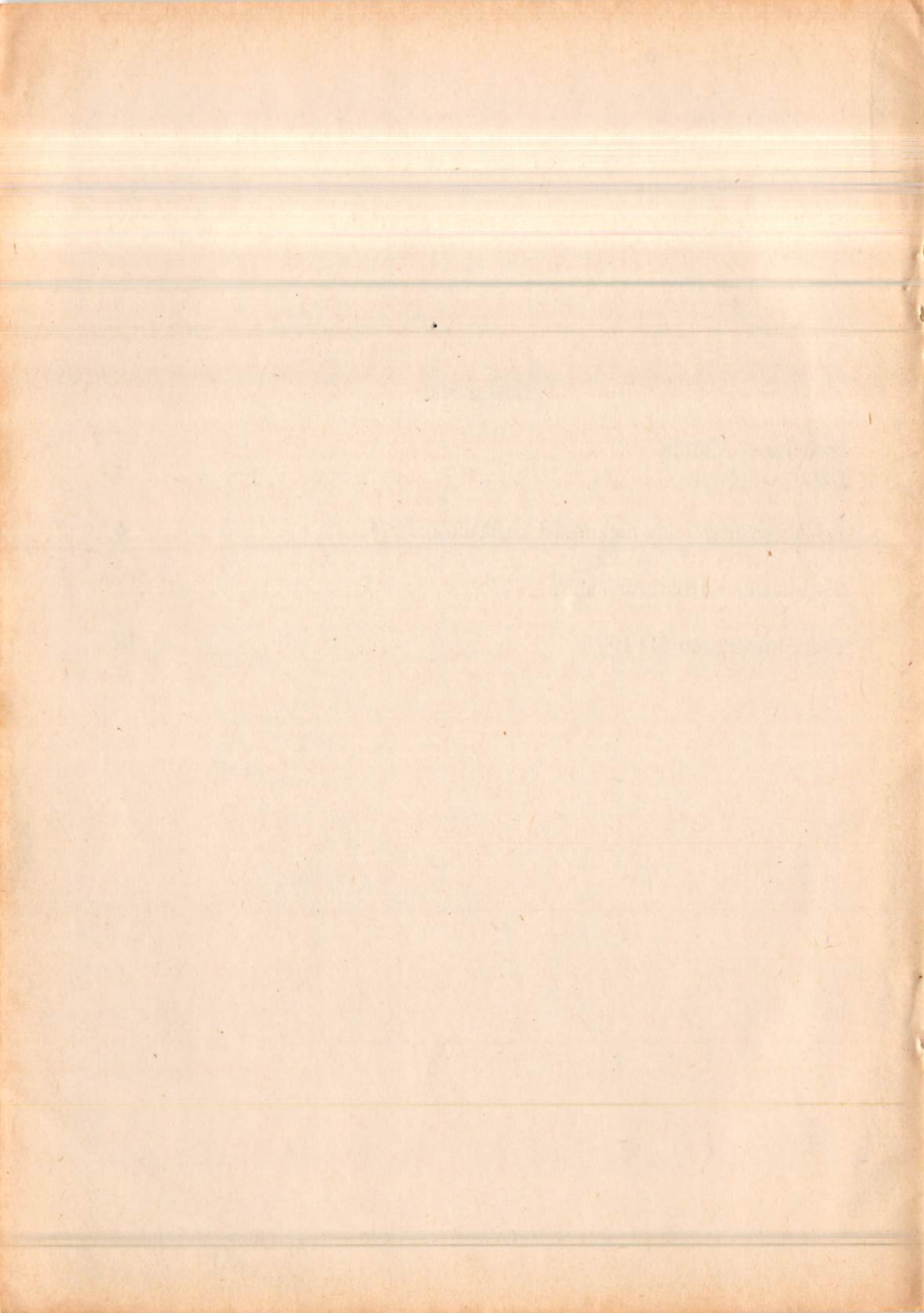
Jakarta, 2 Mei 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SJARIF THAJEB

Daftar Isi

Penjelasan Umum	
Latar belakang	3
Prinsip-prinsip yang melandasi kurikulum 1975	6
Sistematika kurikulum Tahun 1975	11
Buku kurikulum SD 1975	18



PENJELASAN UMUM

ARSIP TUNGGAL
BP 3 K DEP P & K
HARAP DIKEMBALIKAN

APR 10 1887

LATAR BELAKANG

Setelah kurikulum 1968/1969 berjalan selama kurang lebih enam tahun, dirasakan bahwa kurikulum tersebut perlu ditinjau kembali, agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan zaman dan masyarakat. Kesadaran tentang perlunya memperbaharui kurikulum ini, dinyatakan untuk pertama kalinya oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kesempatan Lokakarya Perestuan (Sanctioning) Garis-garis Besar Program Pengajaran untuk kurikulum PPSP pada tanggal 14 Pebruari 1974.

Sejak tahun 1969 memang telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat dari lajunya program pembangunan nasional.

Program-program, kebijaksanaan dan fenomena yang telah mempengaruhi dan melahirkan perubahan-perubahan tersebut antara lain :

- a. Kegiatan-kegiatan pembaharuan pendidikan selama Pelita I yang dimulai pada tahun 1969, telah melahirkan dan menghasilkan gagasan-gagasan baru yang sudah mulai memasuki pelaksanaan sistim pendidikan nasional.
- b. Kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menuntut implementasinya.
- c. Hasil analisa dan penilaian pendidikan nasional telah mendorong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional.
- d. Inovasi di alam sistem belajar-mengajar yang dirasakan dan dinilai lebih efisien dan efektif telah memasuki dunia pendidikan Indonesia.
- e. Keluhan-keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan, mendorong petugas-petugas pendidikan untuk meninjau sistem yang kini sedang berlaku.
- f. Adanya beragam pola kurikulum SD, seperti kurikulum 1968, Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM), dan Paket Buku.

Kesemuanya ini merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi perlunya dilakukan peninjauan kurikulum SD agar lebih sesuai dengan tuntutan, perubahan dan lebih efisien dan efektif di dalam menunjang tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.

Kenyataan-kenyataan, kebijaksanaan baru, dan inovasi baru di bidang

pendidikan yang secara garis besar kami utarakan di atas belum diperhitungkan pada saat kita menyusun kurikulum 1968/1969. Karena itu tema penyusunan kurikulum 1975 adalah untuk menyelaraskan kurikulum SD dengan kebijaksanaan baru di bidang pendidikan nasional, dan inovasi di bidang sistem belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun.

Untuk jelasnya kiranya perlu kami sebutkan di sini beberapa dokumen yang memuat kebijaksanaan Pemerintah di bidang pendidikan yang lahir sesudah tahun 1969;

1. Ketetapan MPR—RI Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Keputusan Presiden no. 17/1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun II Bab 22 "Pendidikan dan Pembinaan Generasi Muda".
3. Pidato tertulis Menteri P dan K menyambut Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1974.
4. Pidato-pidato Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 4.1 Pada Lokakarya Perestuan (Sanctioning) Garis-garis Besar-Program Pengajaran pada PPSP di Cisarua (Lokawiratama), tanggal 14 Pebruari 1974.
 - 4.2 Pidato Pengarahan tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Rapat Koordinasi PPSP di Bandungan Semarang tanggal 27 Juli 1974.
5. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada sidang Komisi IX DPR.

Berapa hasil pembaharuan pendidikan yang ikut diperhitungkan dalam pembakuan kurikulum SD antara lain adalah :

1. hasil-hasil Proyek Penulisan Buku-buku pelajaran;
2. hasil-hasil Proyek Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM);
3. konsep Sekolah Pembangunan tentang integrasi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan; dan

4. inovasi di bidang metode belajar-mengajar, terutama PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).

Di dalam melaksanakan program pembakuan kurikulum ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk team yang terdiri dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (khususnya Pendidikan Dasar dan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan) sebagai Panitia Pengarah, dengan beranggotakan para ahli bidang pelajaran yang meliputi unsur-unsur Kantor Pembinaan SD, para guru SD yang terpilih, dan para ahli dari lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta tenaga ahli dari Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Untuk menjamin konsistensi antara hasil yang dikerjakan oleh team dengan para pemegang pimpinan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Panitia Pengarah telah menempuh proses kerja yang mengenal tahap pengembangan dan tahap perestuan. Pada tahap perestuan hasil kerja team diajukan kepada sidang lokakarya yang diikuti oleh para Kepala Kantor Wilayah, para Rektor Universitas dan Institut, para Direktur dari Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil terakhir konsep kerangka tujuan, struktur, dan materi kurikulum diajukan kepada Menteri melalui pimpinan teras (Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan) setelah diolah bersama oleh para Kepala Kantor Wilayah dan Direktur.

Kini kurikulum tersebut telah disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara nasional dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pengajaran 1976, dengan catatan, bahwa bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah telah mampu, diperkenankan melaksanakannya mulai tahun 1975.

Agar kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana, seperti maksud dari rencana kurikulum tersebut, maka disusunlah penjelasan ini.

Di samping Penjelasan Umum ini akan ditulis juga Penjelasan-penjelasan khusus untuk setiap bidang studi yang secara terperinci akan menjelaskan hal-hal berikut :

1. Prinsip-prinsip dasar dan fungsi sesuatu bidang studi.
2. Ruang lingkup dan tata urutan bahan pengajaran.
3. Pendekatan.
4. Metode penyampaian.
5. Perlengkapan pengajaran.
6. Penilaian.
7. Alokasi waktu.

Penjelasan umum ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan kepada para pelaksana (guru dan tenaga-tenaga administrasi dan supervisi pendidikan) beberapa pengertian yang menyangkut :

1. Prinsip-prinsip yang melandasi kurikulum 1975;
2. Sistematis kurikulum 1975;
3. Struktur Program Kurikulum 1975;
4. Garis-garis Besar Program Pengajaran kurikulum 1975;
5. Sistem Penyajian yang akan digunakan dalam kurikulum 1975 dan
6. Sistem Evaluasi yang akan digunakan dalam kurikulum 1975.

1. PRINSIP-PRINSIP YANG MELANDASI KURIKULUM 1975

Dalam menyusun dan membakukan kurikulum ini digunakan beberapa prinsip, yang memungkinkan sistem pendidikan pada SD benar-benar lebih efisien dan efektif.

1.1 Prinsip fleksibilitas program

Penyelenggaraan pendidikan ketrampilan di SD, misalnya harus mengingat faktor-faktor ekosistem dan kemampuan untuk menyediakan fasilitas bagi berlangsungnya program tersebut.

1.2 Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Waktu sekolah adalah sebagian kecil dari waktu kehidupan murid yang berlangsung selama 24 jam. Dari duapuluh empat jam tersebut hanya sekitar enam jam mereka ada di sekolah. Karena itu kalau waktu yang terbatas ini tidak kita manfaatkan bagi kegiatan-kegiatan yang seterusnya dilakukan para murid di luar lingkungan hubungan murid guru dan fasilitas pendidikan, berarti akan terjadi pemborosan yang merupakan gejala inefisiensi. Sering kita melihat bahwa waktu dua jam pelajaran digunakan mencatat pelajaran yang mungkin dapat dilakukan oleh murid di luar jam sekolah atau memperbanyak bahan tersebut, kalau di toko buku bahan yang diperlukan tidak ada. Cara memanfaatkan waktu seperti kami kemukakan di atas adalah bentuk inefisiensi penggunaan waktu;

Efisiensi tidak hanya menyangkut penggunaan waktu secara tepat, melainkan juga menyangkut masalah pendayagunaan tenaga secara optimal. Kami beranggapan, bahwa tenaga manusia tidak dimanfaatkan secara optimal kalau dia harus belajar dan bekerja tanpa minat dan perhatian yang penuh. Murid-murid adalah manusia-manusia yang mengenal kelelahan dan batas perhatian. Kalau kita memaksakan murid untuk belajar di luar perhatian dan kemampuan tenaganya, akan berakibat penghamburan tenaga dan waktu. Karena itu di dalam menetapkan jumlah jam dan lamanya setiap pelajaran yang diberikan, harus diukur dari sudut tingkat kemampuan, tenaga, luas dan lama perhatian yang dapat diharapkan dari seorang murid. Melupakan kedua prinsip efisiensi tersebut akan mengakibatkan hasil belajar anak kurang memuaskan. Dengan kata lain proses belajar yang dilakukan murid tidak berjalan secara efisien dan efektif.

Atas dasar prinsip efisiensi dan efektivitas inilah kurikulum 1975 memilih jumlah jam pelajaran selama seminggu 36 jam dan bukan 42 jam, karena pertimbangan bahwa para murid dapat dituntut untuk bekerja lebih keras pada setiap jam

yang tersedia, dengan tetap memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih santai pada saat-saat tertentu. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan belajar yang sifatnya wajib dan akademis ditekankan pada hari Senin sampai dengan Jumat sedangkan kegiatan-kegiatan pada hari Sabtu sifatnya pilihan wajib, ekspresif dan rekreatif.

Atas dasar prinsip ini juga disarankan agar setiap pelajaran hendaknya tidak diberikan dalam 1 jam pelajaran saja untuk satu minggu, melainkan antara 2 jam dan sebanyak-banyaknya 3 jam pada setiap pertemuan. Sistem catur wulan masih tetap digunakan tetapi dengan suatu pengertian yang akan menuntut guru secara sistematis dan berencana menyusun kegiatan-kegiatan mengajar dalam satuan-satuan catur wulan secara bulat. Bentuk usaha yang dilaksanakan adalah agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh murid dan guru bagi kegiatan belajar-mengajar yang efisien dan efektif. Prinsip ini juga akan mempengaruhi penyusunanjadwal pelajaran setiap-minggunya.

1.3 Prinsip berorientasi pada tujuan

Seperti telah kami singgung di atas, waktu para murid berada dalam lingkungan sekolah hanyalah sekitar seperempat dari pada waktu yang dimiliki anak selama 24 jam. Ini berarti bahwa proses perkembangan murid ke arah kedewasaannya tidak dapat sepenuhnya digantungkan kepada sekolah semata-mata. Namun demikian kami menyadari bahwa sekolah adalah tempat yang paling strategis untuk pembinaan nilai dan sikap, ketrampilan dan kecerdasan yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Atas dasar pertimbangan di atas waktu yang terbatas tersebut harus benar-benar dimanfaatkan bagi pembinaan murid untuk hal-hal tersebut di atas, terutama untuk kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang tidak mungkin dilakukan dan diperoleh di luar sekolah. Dalam konteks yang demikian kami melihat kenyataan bahwa bahan-bahan pelajaran tiap tahun makin

bertambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan masyarakat. Karena itu memilih kegiatan-kegiatan dan pengalaman-pengalaman belajar yang fungsional dan efektif akan memerlukan kriteria yang jelas. Untuk itulah kami menggunakan suatu prinsip kerja atau pendekatan dengan berorientasi pada tujuan. Ini berarti bahwa sebelum menentukan jam dan bahan pelajaran terlebih dahulu akan ditetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh para murid dengan jalan mempelajari sesuatu bidang pelajaran (studi). Proses indentifikasi dan perumusan tujuan ini berlangsung dari tingkatan yang paling umum, seperti tertulis dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam bentuk tujuan-tujuan institusional, sampai kepada tujuan-tujuan instruksional khusus yang akan memberi arah kepada pemilihan bahan dan kegiatan belajar untuk setiap satuan pelajaran yang terkecil. Dengan prinsip ini dimaksudkan agar setiap jam dan kegiatan pelajaran yang dilakukan oleh murid dan guru benar-benar terarah kepada tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.

1.4 Prinsip kontinuitas

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (Pertama dan Atas) adalah sekolah-sekolah umum, yang masing-masing fungsinya dinyatakan dalam tujuan-tujuan institusional. Namun satu dengan yang lain berhubungan secara hirarkis. Karena itu dalam menyusun kurikulum, ketiga sekolah tersebut selalu diingatkan hubungan hirarkis yang fungsional Pendidikan Dasar disusun agar lulusannya, di samping siap untuk berkembang menjadi anggota masyarakat, juga siap untuk mengikuti pendidikan menengah tingkat pertama, demikian juga dengan sekolah menengah tingkat pertama di samping memiliki bekal ketrampilan untuk memasuki masyarakat kerja, juga harus siap memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Hubungan fungsional hirarkis ini, harus diingat dalam menyusun program-program

pengajaran dari ketiga sekolah tersebut. Kalau tidak, dapat terjadi pengulangan yang membosankan atau pemberian pelajaran yang sukar ditangkap dan dikunyah oleh para murid karena mereka tidak memiliki dasar yang kokoh.

Bagi suatu bidang pelajaran yang menganut pendekatan spiral, seperti pelajaran sejarah atau kewargaan negara, perluasan dan pendalaman sesuatu pokok bahasan dari tingkat pendidikan satu ke tingkat berikutnya harus disusun secara berencana dan sistematis.

Garis-garis besar program pengajaran yang disusun untuk setiap bidang studi dikerjakan secara integral dengan maksud agar jelas perbedaan antara pokok bahasan, yang kelihatannya sama, yang diberikan di SD dengan di SMP.

Para pelaksana (terutama guru) diharapkan untuk memahami hubungan yang fungsional hirarkis antara pelajaran yang diberikan di SD dengan SMP, antara satu caturwulan dengan caturwulan berikutnya, dan bahkan antara satuan pelajaran untuk satu bulan dengan bulan berikutnya. Pelaksanaan prinsip ini mengharuskan kita untuk memahami hubungan secara hirarkis antara satuan-satuan pelajaran.

1.5 Prinsip pendidikan seumur hidup

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menganut pendidikan prinsip pendidikan seumur hidup. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Prinsip ini mengandung makna, bahwa masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan berlangsung sepanjang hidup. Namun demikian kita menyadari bahwa sekolah adalah tempat dan saat yang sangat strategis, bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina generasi muda dalam menghadapi masa depannya. Bagi pemuda pun usia

sekolah adalah usia yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan belajar.

Dengan berprinsip kepada pendirian ini, tugas sekolah tidak hanya membina pengetahuan dan kecakapan yang berguna untuk dimanfaatkan secara langsung setelah mereka lulus, melainkan juga menyiapkan sikap dan nilai serta kemampuan untuk belajar terus bagi perkembangan pribadinya.

Masyarakat belajar yang dicita-citakan akan terjadi bila generasi pengisi masyarakat tersebut bergairah untuk belajar dan masyarakatnya menantang para warganya untuk belajar.

2. SISTIMATIK KURIKULUM TAHUN 1975

Yang dimaksud dengan kurikulum SD 1975 oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah serangkaian ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur berikut :

- (2.1.) Tujuan-tujuan Institusionil Sekolah Dasar;
- (2.2.) Struktur Program Kurikulum;
- (2.3.) Garis-garis Besar Program Pengajaran;
- (2.4.) Sistem Penyajian yang menggunakan pendekatan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional);
- (2.5.) Sistem Penilaian;
- (2.6.) Sistem Bimbingan dan Penyuluhan; dan
- (2.7.) Supervisi dan administrasi.

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa seseorang belum dapat disebut memahami kurikulum 1975, apabila baru mempelajari tujuan-tujuan institusionil saja atau Garis-garis Besar Program Pengajaran, melainkan harus ke semua unsur tersebut. Karena ke semua unsur tersebut akan memberikan warna pada kurikulum 1975 sebagai sistem pengajaran.

Berikut ini akan kami jelaskan kedudukan masing-masing unsur tersebut di atas sebagai bagian integral dari pada sistematik kurikulum 1975.

2. Tujuan-tujuan Institusionil

Di dalam Keputusan-keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum SD tahun 1975 telah digariskan Tujuan Umum dan Tujuan Khusus dari pada pendidikan pada SD. Tujuan-tujuan tersebut pada pasal 4 adalah tujuan pendidikan yang secara melembaga harus dicapai oleh program pendidikan pada masing-masing sekolah. Karena itu tujuan-tujuan pendidikan pada taraf ini disebut tujuan institusionil.

Sebagai satu kesatuan sistem, segala kegiatan belajar baik yang sifatnya akademis, ketrampilan, maupun pembinaan moral Pancasila telah disusun dan direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan seperti termaksud dalam rumusan tujuan institusionil;

Karena itu setiap guru dan pelaksana pendidikan untuk setiap tingkatan pendidikan, harus memahami dan mendalami makna dari tujuan-tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri pada hakekatnya adalah penjabaran dari pada tujuan-tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Tanpa pemahaman yang mendalam akan makna tujuan-tujuan pada tingkatan ini akan memungkinkan terjadinya suatu ketidak serasian antara kegaitan-kegiatan belajar-mengajar yang kita rencanakan dengan tujuan-tujuan yang harus dicapai.

Penjabaran tujuan dan arah pendidikan nasional ke dalam tujuan-tujuan institusionil, adalah bentuk usaha agar tujuan umum pendidikan nasional benar-benar menjadi pedoman didalam menyusun program-program kegiatan belajar-mengajar pada setiap lembaga pendidikan nasional.

Tujuan-tujuan institusionil tersebut di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disusun dalam bentuk dua rumusan. Rumusan bersifat umum yang menggambarkan kualifikasi umum seorang lulusan setiap lembaga pendidikan. Rumusan umum ini disebut di dalam Keputusan tersebut sebagai tujuan umum.

Tujuan umum ini kemudian dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus yang menggambarkan kualifikasi yang harus dimiliki oleh para lulusan dalam hal pengetahuan, ketrampilan, dan sikapnya untuk berbagai bidang pelajaran. Dengan demikian akan mudahlah bagi kita untuk menyusun program-program pengajaran yang lebih khusus. Dengan itu pula kita akan mudah menyusun alat penilaian untuk mengukur sampai berapa jauh rencana tentang kualifikasi lulusan sebuah sekolah telah tercapai.

Di dalam tujuan-tujuan khusus ini secara umum digambarkan pengetahuan yang hendaknya dikuasai oleh murid dalam bidang kewarganegaraan, kesehatan, matematika, dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan ketrampilan yang harus dikuasai, dan sikap yang harus telah mempribadi.

Sebelum mengakhiri penjelasan kami tentang tujuan institusional, kiranya perlu kami tegaskan di sini bahwa tujuan tersebut melukiskan ketrampilan, pengetahuan, dan sikap yang hendaknya dimiliki dan dikuasai setelah menyelesaikan program-program yang diselenggarakan pada sekolah tersebut.

Dengan jelasnya tujuan-tujuan yang secara institusional harus dikuasai itu, mudahlah kiranya bagi kita untuk memahami struktur program kurikulum yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

2.2 Struktur Program Kurikulum

Kerangka umum dari pada program-program pengajaran yang akan diberikan pada setiap sekolah dapat dipelajari pada Struktur Program Kurikulum (lihat pasal 6 dan 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008c/U/75).

Pada bagian ini dapat dipelajari :

- (1) Jenis-jenis program pengajaran yang akan diselenggarakan di SD;
- (2) Perbandingan alokasi yang diberikan kepada masing-ma-

sing jenis program pengajaran dan jam pelajaran yang disediakan untuk setiap minggu;

- (3) Alokasi jam pelajaran untuk setiap bidang-studi dari tingkatan ke tingkatan;
- (4) Jenis-jenis bidang studi yang diselenggarakan.

Dengan mempelajari bagian ini guru pemegang mata-pelajaran akan mengetahui :

- (1) Kedudukan matapelajaran atau bidang pelajaran (bidang studi) yang dipegangnya dalam program-program setiap jurusan;
- (2) Lamanya pelajaran tersebut diberikan;
- (3) Waktu yang disediakan untuk menyelenggarakan program pelajaran tersebut pada setiap minggu-caturwulan.

Dengan pengetahuan ini setiap guru dapat secepatnya memperkirakan strategi yang harus disusun dalam penyelenggaraan program pengajaran yang harus dilaksanakan.

2.3 Garis-garis Besar Program Pengajaran

Bidang studi yang telah ditentukan jumlah jam yang disediakan untuk tiap minggu serta lamanya bidang studi tersebut diberikan, seperti tertulis pada struktur program, pada bagian ini secara terperinci dijelaskan :

- (1) Tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti program pengajaran yang bersangkutan selama masa pendidikan di SD dalam bentuk rumusan tujuan-tujuan kurikuler;
- (2) Tujuan-tujuan yang hendaknya dicapai dalam setiap satuan pelajaran (baik caturwulan atau tahunan) dalam bentuk tujuan instruksional umum;
- (3) Pokok-pokok bahasan yang harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pengajaran bagi para siswa, agar mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan;
- (4) Urutan penyampaian bahan-bahan pengajaran tersebut dari tahun pelajaran satu ke tahun pelajaran berikutnya dan dari caturwulan satu ke caturwulan berikutnya.

Di dalam mempelajari bagian ini harus diingat bahwa kedudukan tujuan-tujuan dan bahan-bahan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan lembaga ini, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan nasional.

Pokok-pokok bahasan yang telah disusun secara berurutan ini selanjutnya perlu dikembangkan menjadi suatu program instruksional yang lebih khusus, perincian pokok-pokok bahasan, alat-alat pelajaran yang harus disediakan dan digunakan, cara mengajar dan belajar yang harus ditempuh, lamanya pelajaran itu diadakan, alat evaluasi yang perlu disusun untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan para murid.

Proses pengembangan pokok-pokok bahasan yang diambil dari bagian Garis-garis Besar Program Pengajaran ini, akan dilakukan dengan menggunakan teknik dan pendekatan sistim instruksional yang kemudian dikenal dengan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistim Instruksional).

2.3 Sistem Penyajian

Dalam rangka melaksanakan prinsip efisiensi dan efektivitas, diperlukan suatu sistem yang menjamin bahwa waktu yang tersebut dimanfaatkan secara berencana bagi kegiatan belajar dan mengajar yang fungsional, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional berlandaskan pada pandangan, bahwa proses belajar-mengajar itu sebagai suatu sistem senantiasa harus diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan ini harus jelas, spesifik, dapat diukur, dan dirumuskan dalam bentuk kemampuan atau tingkah-laku murid. Dengan tujuan yang jelas akan mudah kita menyusun alat evaluasinya, akan mudah kita menyusun materi pelajarannya, dan akan mudah kita memilih metode mengajarnya yang relevan, serta akan mudah kita menyusun proses kegiatan belajar-mengajar yang sistematis.

Dengan sistem pengajaran melalui PPSI akan terealisasi gagasan pembaharuan dalam proses belajar-mengajar yang perlu diikuti oleh guru-guru.

Untuk memudahkan pelaksanaan kurikulum SD – 1975 dalam seri buku kurikulum ini dilengkapi dengan contoh-contoh kongkrit tentang cara penyusunan dan proses pengajaran di kelas, yang dinamakan Model Satuan Pelajaran. Dengan Model Satuan Pelajaran sebagai contoh kongkrit guru diwajibkan untuk selalu menyusun persiapan dalam program satuan-satuan pelajaran sepanjang tahun ia mengajar.

Kerangka Model Satuan Pelajaran tersebut adalah sbb :

1. Bidang Studi : (apa ?)
2. Mata pelajaran/Sub Bidang Studi : (apa ?)
3. Pokok Bahasan : (mengenai apa ?)
4. Kelas : (berapa ?)
5. Catur wulan : (ke berapa)
6. Waktu : (berapa jam pelajaran/ minggu).

I. Petunjuk Guru

1. Pedoman umum tentang cara penggunaan satuan pelajaran yang bersangkutan.
2. Prasyarat yang menentukan kemampuan yang perlu dikuasai terlebih dahulu oleh murid sebelum mengikuti suatu satuan pelajaran (pre-rikwisit).
3. Jumlah dan pembagian waktu yang diperlukan untuk melaksanakan satuan pelajaran tersebut.

II. Tujuan instruksional khusus

Merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan proses pengajaran dengan rumusan se-operasionil dan se-spesifik mungkin, sehingga mudah diukur dalam rangka evaluasi.

III. Materi Pelajaran

Menetapkan pokok-pokok materi pelajaran yang akan diprogramkan dalam rangka mer capai tujuan-tujuan instruksional, dan sebaiknya dilengkapi dengan uraian singkat tentang pokok-pokok materi tersebut.

IV. Kegiatan belajar-mengajar

Merencanakan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dari murid selama proses pengajaran berlangsung. Biasanya ditetapkan penggunaan satu atau beberapa metode pengajaran untuk melengkapi kegiatan belajar mengajar tersebut.

V. Alat-alat pelajaran

Menetapkan alat-alat pelajaran termasuk kepustakaan, yang dipergunakan dalam proses pengajaran dalam rangka menunjang tercapainya tujuan-tujuan instruksional yang diinginkan.

VI. Evaluasi

Menetapkan alat-alat evaluasi yang dipergunakan, meliputi proses dan materi evaluasi (langkah II dalam PPSI).

2.5 Sistem Penilaian

Kurikulum SD 1975 ini akan merobah pandangan lama tentang sistem penilaian, dalam mana pelaksanaan penilaian hanya dapat diadakan pada akhir caturwulan atau akhir tahun. Dengan mengimplementasikan PPSI, dengan sendirinya guru-guru dituntut untuk melaksanakan penilaian pada setiap akhir sesuatu satuan pelajaran. Dengan kata lain evaluasi diadakan terus menerus, dan diselenggarakan secara menyeluruh, dalam arti seluruh aspek tingkah laku murid dinilai.

3. BUKU KURIKULUM SD 1975

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh di bawah ini diberikan ikhtisar Buku Kurikulum SD 1975 sbb. :

BUKU I Ketentuan-ketentuan Pokok

- a. Pengantar
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - No. 008c/U/1975, tanggal 17 Januari 1975.
- c. Penjelasan Umum.

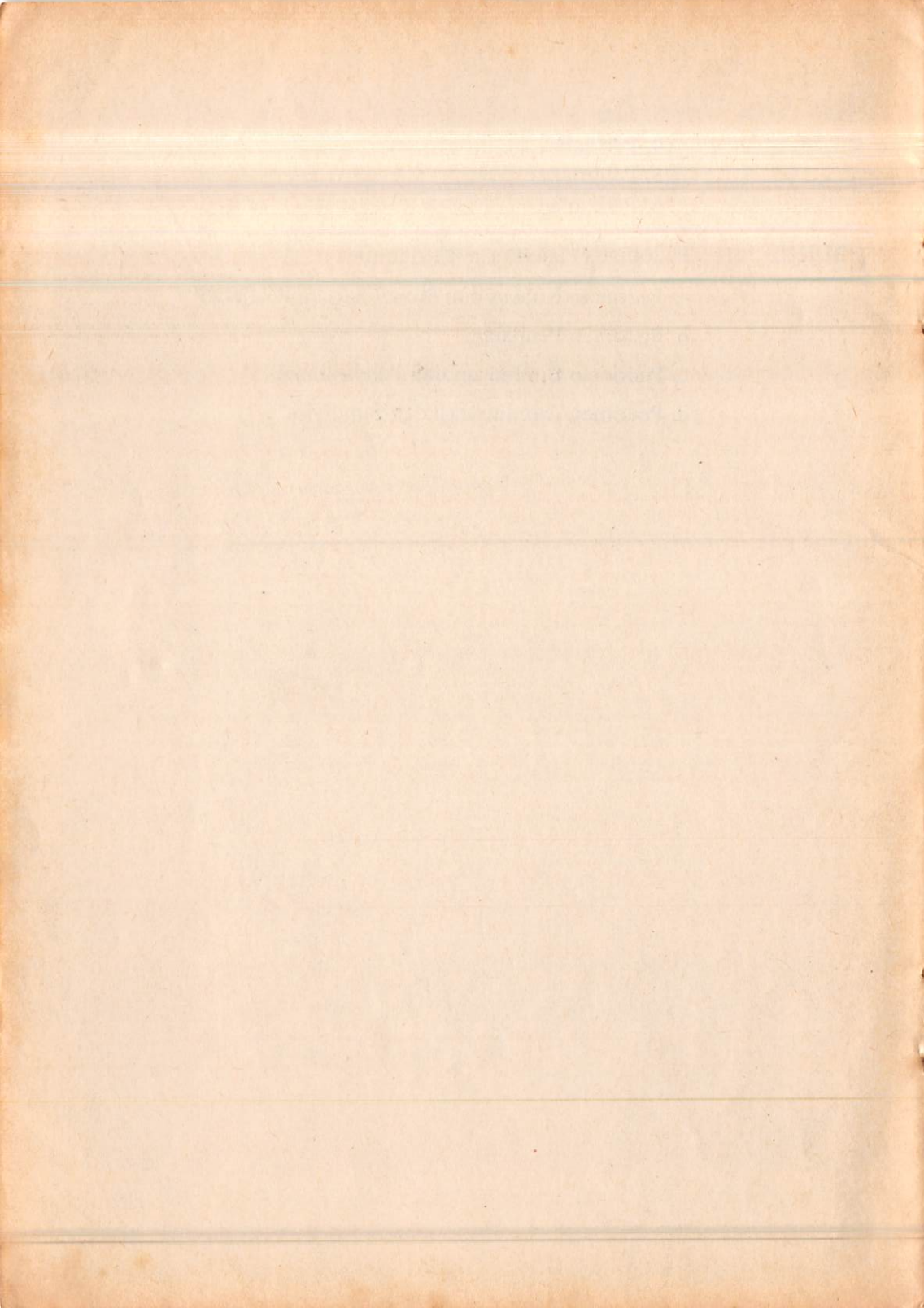
BUKU II. Garis-garis Besar Program Pengajaran.

- a. Bidang Studi Agama :
 1. Islam
 2. Kristen Protestan
 3. Katolik
 4. Hindu
 5. Budha
- b. Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila
- c. Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
- d. Bidang Studi Bahasa Indonesia
- e. Bidang Studi Olahraga dan Kesehatan
- f. Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- g. Bidang Studi Matematika
- h. Bidang Studi Kesenian
 1. Seni tari
 2. Seni Rupa
 3. Seni Musik
- i. Bidang Studi Ketrampilan
 1. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 2. Kerajinan dan Teknik

3. Jasa
4. Pertanian
5. Peternakan
6. Perikanan

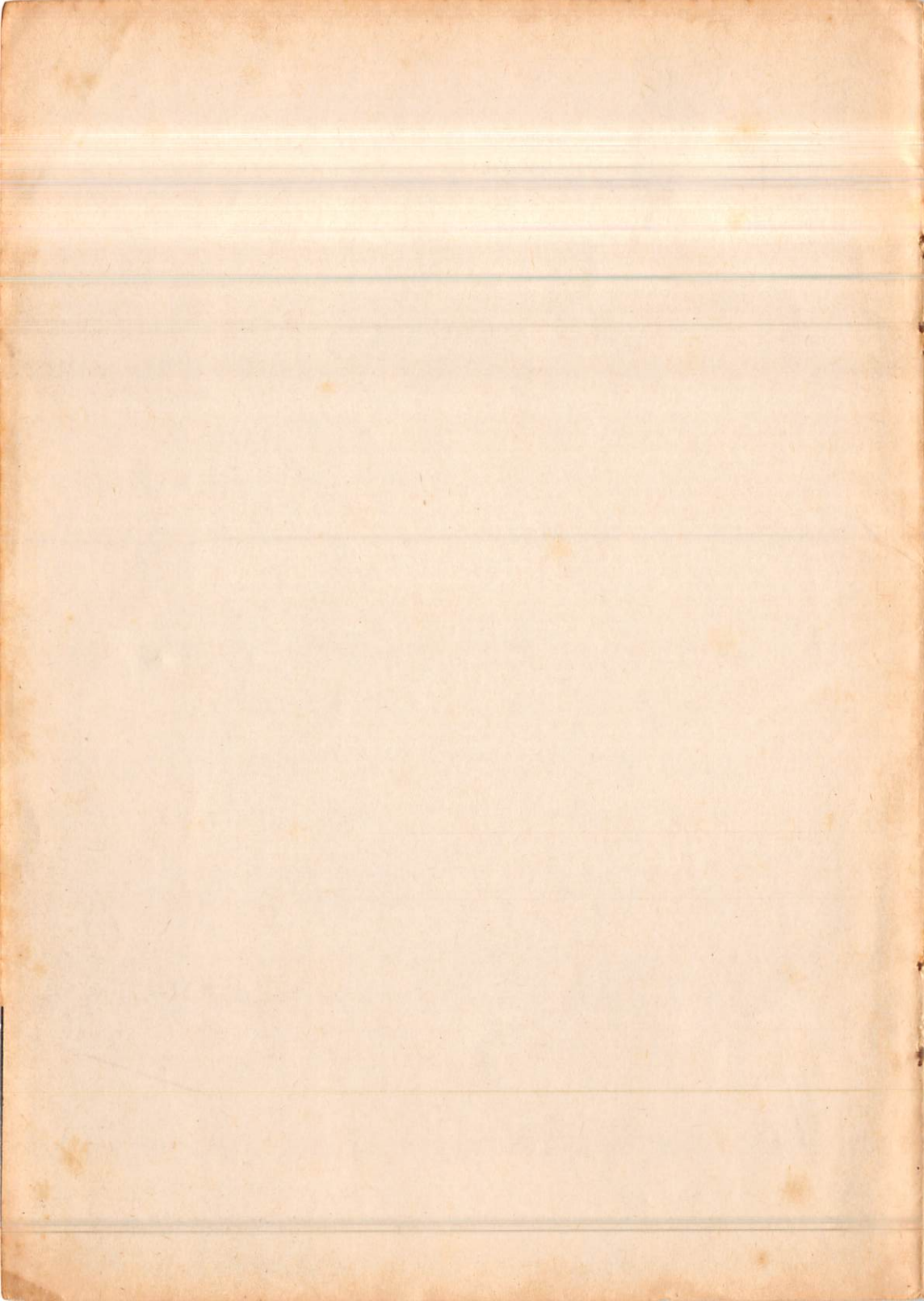
BUKU III. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum

- a. Pedoman Khusus dan Model Satuan Pelajaran
- b. Pedoman Penilaian
- c. Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan
- d. Pedoman Administrasi dan Supervisi.



ARSIP TUNGGAL
P P 3 K D I P P & K

ARIP TUKOGA





BALAI PUSTAKA — JAKARTA